

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejatinya hutan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, hal ini berdasarkan pada manfaat hutan yang dapat menyediakan berbagai kebutuhan manusia. Namun nyatanya hal ini di salah gunakan oleh manusia, dengan adanya aktivitas pembangunan yang semakin meningkat, hal ini berdampak pada terkikisnya kawasan hutan. Hubungan antara kualitas lingkungan suatu Negara sangat erat kaitannya dengan tata kelola pemerintah-nya. Berbagai masalah timbul karena pemerintah terus mengizinkan kolusi pihak-pihak yang memiliki koneksi politik untuk menggunakan berbagai cara licik untuk meraup penghasilan dengan mengorbankan para wirausahawan lokal. Hal ini diperparah dengan adanya arus globalisasi yang tidak dibersamai dengan tata kelola pemerintah yang baik. Pemerintah melakukan pembukaan batas-batas Negara tanpa regulasi bagi investor asing, yang mana memiliki jumlah modal yang besar, pengetahuan serta keahlian yang mumpuni kemudian menjadikan masyarakat akar rumput menjadi terpinggirkan serta menyebabkan kualitas lingkungan yang buruk.

Perkembangan dunia semakin hari semakin pesat hal ini disebabkan oleh adanya globalisasi. Pengaruh globalisasi sangat besar bagi hubungan internasional hal ini ditandai dengan adanya keterbatasan peran yang dimiliki oleh suatu negara. Dengan adanya globalisasi mengakibatkan statisme telah kehilangan landasannya karena negara tidak mampu mengontrol modal finansial, peredaran narkoba, terorisme, permasalahan lingkungan dan masalah global lainnya. Globalisasi telah memaksakan "mundurnya negara" dan membawa pemerintahan ke tangan kekuatan korporat dan pasar swasta yang memajukan kepentingan pribadi mereka dengan mengorbankan masyarakat yang termarginalkan. Hal ini dapat kita lihat terkait permasalahan mengenai lingkungan dewasa ini menjadi isu hubungan internasional yang cukup signifikan, hal ini disebabkan dari karakter isu lingkungan yang bersifat *transboundary* dan global, yang akhirnya membawa isu lingkungan tersebut menjadi isu *high politics* (Manafe, 2012).

Banyak sekali permasalahan lingkungan yang tidak dapat diatasi oleh negara, hal ini dapat ditandai dengan adanya ketimpangan pembangunan yang terjadi di suatu negara. Negara lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa memperdulikan dampak kerusakan lingkungan serta ekologi yang semakin parah. Salah satu isu lingkungan yang terjadi di berbagai negara di dunia adalah degradasi hutan. Dalam konteks perubahan iklim,

degradasi hutan dapat didefinisikan sebagai hilangnya cadangan karbon tanpa perubahan tutupan lahan. Dibandingkan dengan proses degradasi lainnya hilangnya stok karbon dapat secara langsung terkait dengan kegiatan penebangan dan kebakaran, yang bermanifestasi dalam perubahan tutupan kanopi (Bewemick, 2016).

Kenya merupakan salah satu negara yang mengalami tingkat deforestasi yang tinggi, hal ini disebabkan oleh adanya pembangunan yang menjadikan kawasan tutupan hutan beralih menjadi lahan pertanian serta penggembalaan yang tidak terkendali. Serta rendahnya peran pemerintah dalam pengawasan dan pengelolaan di sektor kehutanan yang menyebabkan permasalahan lingkungan di Kenya semakin meningkat. Masyarakat Kenya menghadapi ancaman kekeringan yang muncul sebagai akibat dari penyalahgunaan lahan dan terkikisnya hutan secara meluas, yang akhirnya perilaku tersebut berujung pada permasalahan yang semakin meluas yaitu: erosi tanah, kurangnya air bersih, kurangnya bahan bangunan, kekeringan, kelaparan berkepanjangan, gizi buruk bahkan berujung pada kematian (Maathai, 2006).

Penebangan pohon tanpa pandang bulu dan penggundulan tanaman penutup permukaan tanah akibat pembangunan yang meluas menyebabkan pengikisan tanah di Kenya semakin tinggi. Selama musim hujan, ribuan ton humus terkikis dari wilayah pedesaan Kenya oleh sungai dan hanyut ke laut dan danau. Selain itu juga humus hilang oleh erosi angin di daerah-daerah yang tanahnya tidak ditutupi tumbuhan. Padahal humus merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi pertanian. Kemudian masalah selanjutnya yaitu mayoritas masyarakat pedesaan di Kenya menggunakan kayu bakar untuk memasak dan menghangatkan rumah-rumah mereka. Namun, tempat-tempat kayu bakar terus diambil oleh para kalangan korporat dan pemerintah tanpa menggantinya dengan yang baru. Kondisi inilah yang memaksa para perempuan untuk berjalan makin jauh dan demi mengumpulkan kayu bakar. Tentu kegiatan ini sangat melelahkan dan memakan waktu yang banyak, terlebih lagi di daerah yang kayu bakarnya dikumpulkan dari hutan, keanekaragaman hayati perlahan menjadi terancam (Maathai, 2006). Jika sebuah Negara sedang terancam, ia akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, termasuk militer bersenjata lengkap untuk melindungi tanah air yang berharga. Namun sayangnya hal-hal tersebut belum di pandang sedemikian genting di Kenya.

Praktik-praktik picik yang berkontribusi terhadap penurunan kawasan tutupan hutan dapat ditelusuri pada masa kolonial Kenya. Adanya praktik pembukaan lahan untuk menanam tanaman komersial, pada mulanya di inisiasi oleh para penjajah Inggris dari tahun 1887 yang menjajah wilayah Kenya. Para penjajah Inggris tersebut mengatakan kepada

masyarakat Kenya bahwa tanaman pangan lokal mereka terbelakang, dan mendorong untuk mengganti tanaman tersebut dengan tanaman yang lebih bersifat komersial seperti kopi, teh, sawit. Pengaruh sistem kolonial itu tidak hanya merubah dalam praktik lingkungan tetapi juga dalam sikap umum masyarakat Kenya (Rush & College, 2020).

Kenya kehilangan sekitar 12.000 ha hutan setiap tahun dari tahun 1990 hingga 2005 melalui deforestasi, dan tutupan hutan 12% pada tahun 1963 telah berkurang menjadi sekitar 6,9% pada tahun 2017 karena tekanan populasi untuk pemukiman, infrastruktur, permintaan produk kayu dan konversi ke lahan pertanian komersial (Government of Kenya, 2018). Kelompok kerja kehutanan Kenya memperkirakan bahwa Kenya akan kehilangan US\$300 juta setiap tahun karena deforestasi. Antara tahun 2000-2010, deforestasi di Menara air utama diperkirakan mencapai 28.427 hektar, yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air sekitar 62 juta meter kubik per tahun (UNEP, 2012). Misalnya hutan Mau, menara air terpenting kehilangan sekitar 107.000 hektar dari 416.000 hektarnya akibat alokasi ilegal antara tahun 1990-2001. Degradasi hutan telah memicu kelangkaan sumber daya serta merupakan penyebab utama perubahan iklim karena pembukaan hutan melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca (Dean, 2019).

Dengan adanya permasalahan tersebut maka *Green Belt Movement* sebagai salah satu NGO di Kenya berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan advokasi bersama para kalangan di tingkat internasional, pemerintah dan masyarakat akar rumput (*grassroots*) untuk bersama-sama melakukan pembangunan Kenya menjadi lebih baik dalam menghadapi degradasi hutan. Hal ini dilakukan sebagaimana yang terkandung dalam *Sustainable Development Goals (SDGS)* poin ke-15 *Life on Land* yang memiliki tujuan untuk melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan ekosistem darat secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, serta menghentikan dan membalikkan degradasi lahan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati (United Nations, 2020). Atas dasar isu tersebut maka *Green Belt Movement* sebagai salah satu NGO yang berada di Kenya ikut berperan aktif dalam mengatasi permasalahan degradasi hutan yang semakin meningkat di Kenya.

Green Belt Movement secara resmi didirikan pada tanggal 5 Juni 1977 dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan menanam tujuh bibit dan melibatkan tujuh suku bangsa dihormati melalui penanaman pohon. Kegiatan tersebut dilakukan di Nairobi ibu kota Kenya, mulai dengan tujuh bibit pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia di 1977, gerakan segera memulai strategi penanaman pohon yang meluas di mana lebih dari seribu bibit ditanam dalam barisan panjang untuk membentuk sabuk hijau pepohonan. Pada saat

awal kemunculannya GBM mendapatkan dukungan yang sangat kecil dan cenderung dibatasi. Dalam hak-hak perempuan, strategi utama GBM dari tahun 1977-1988 adalah memberdayakan perempuan dan menyediakan pendidikan mengenai lingkungan (Cockram, 2017). Karena pada masa itu isu lingkungan seperti degradasi, deforestasi dan kerawanan pangan menjadi permasalahan yang pelik. Kemudian GBM mulai menginisiasi untuk memulai gerakan penanaman pohon guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena pohon tidak hanya memberikan keteduhan dan pasokan kayu dan makanan bagi masyarakat, tetapi juga mengikat tanah untuk melindungi masyarakat dari daerah aliran sungai. Dengan demikian GBM bertujuan untuk menunjukkan bagaimana memperbaiki lingkungan untuk memberi sumber daya yang masyarakat butuhkan serta mengarah pada peningkatan kualitas taraf hidup.

Walau pada awalnya kegiatan penanaman pohon *Green Belt Movement* tidak ditujukan untuk menjawab masalah demokrasi dan perdamaian, menjadi jelas setelahnya bahwa tata kelola lingkungan yang bertanggungjawab tidak mungkin dicapai tanpa ruang demokratis. Oleh karena itu, pohon pun menjadi simbol perjuangan demokrasi Kenya. Warga bergerak menentang penyalahgunaan kekuasaan yang kian meluas, korupsi dan *miss*-manajemen lingkungan. Di taman Uhuru, Nairobi dan di banyak daerah seluruh negeri, pohon-pohon perdamaian di tanam untuk menuntut pembebasan para tahanan politik dan transisi damai menuju demokrasi (Taylor, 2013).

GBM yang pada awalnya berfokus menjadi arena sosial bagi perempuan Kenya. Kemudian melebarkan sayapnya dengan melakukan pendekatan politiknya yang bersifat non-konfrontatif. GBM berusaha untuk menjembatani kesenjangan antara strategi pembangunan pemerintah Kenya dan kurangnya implementasi terutama yang menyangkut lingkungan. Kondisi lingkungan suatu negara merupakan cerminan pemerintahan yang sedang berkuasa dan tanpa tata pemerintahan yang baik, maka kedamaian di suatu negara tersebut susah untuk diciptakan. Banyak sekali negara yang memiliki sistem tata kelola yang buruk serta cenderung mengalami konflik dan sangat minim memiliki undang-undang perlindungan lingkungan. Sedangkan *Green Belt Movement* berpendapat bahwa tidak ada perdamaian tanpa pengelolaan lingkungan yang baik (Devita & Waluyo). Serta suatu Negara harus menerapkan konsep *Environmental security*, yaitu konsep keamanan yang didasarkan pada pemikiran bahwa ancaman yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan memiliki dampak yang sama dengan ancaman yang timbul akibat konflik bersenjata. Pendekatan ini diimplementasikan melalui pengembangan kebijakan untuk melindungi

lingkungan dari ancaman manusia serta mencegah terjadinya konflik politik dan perang yang diakibatkan oleh perubahan dan degradasi lingkungan.

Green Belt Movement menekankan bahwa suatu reformasi idealnya mengutamakan kebermanfaatan jangka panjang, daripada mementingkan keuntungan sesaat. Peningkatan kapasitas kewirausahaan juga penting untuk membentengi rakyat dari kompetisi yang tidak adil dan mengarahkan pemberdayaan ekonomi sebagai pendongkrak nilai komoditas sekaligus kesejahteraan rakyat. Serta peran pemimpin menjadi vital di sini, sedangkan Kenya mengalami kelangkaan jiwa kepemimpinan. Penguasa negara dan aparatnya mempraktikkan kultur yang buruk dalam pemerintahan. Medan politik Kenya sarat dengan konflik kepentingan berbasis etnis atau golongan. Pemimpin yang ideal seharusnya dapat memberikan teladan penanaman dan implementasi nilai kebaikan universal seperti jujur, adil, dan peduli pada nasib sesama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka munculah permasalahan dalam penulisan ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana advokasi yang dilakukan oleh *Green Belt Movement* dalam upaya mengatasi isu degradasi hutan di Kenya?”

C. Kerangka Pemikiran

1. Konsep *Non-Governmental Organization* (NGO) Philip Eldridge

Non-Governmental Organization (NGO) merupakan salah satu elemen penting di dalam masyarakat sipil internasional yang tidak terikat oleh pihak apapun serta NGO hadir dengan membawa nilai yang dijunjung bersama guna membawa dunia kearah yang lebih baik. Kemunculan NGO sangat berkaitan erat sekali dengan adanya fenomena eksternal yaitu globalisasi serta dari faktor internal yaitu pembangunan. Dengan adanya proses globalisasi yang semakin intensif maka NGO hadir memobilisasi jaringan global dengan membuat organisasi masyarakat transnasional. NGO yang beroperasi pada tingkat transnasional telah menjadi penentu yang lebih signifikan dari kebijakan luar negeri negara-bangsa (Dar, 2014). Sedangkan NGO yang beroperasi di tingkat domestik, mereka melakukan upaya melobi di negara masing-masing terkait isu-isu yang beragam, seperti hak asasi manusia, hak-hak minoritas masyarakat adat, promosi demokrasi, advokasi nelayan dan petani, advokasi non-kekerasan dan perdamaian, dukungan untuk anak, hak-hak buruh, isu lingkungan hidup,

isu kesehatan, persoalan agama, hak-hak gender, teknologi alternatif, dan isu kebudayaan (Ungpakorn, 2011).

Non-Governmental Organization (NGO) menurut Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi yang ditulis oleh Khasan Ashari didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang membentuk kelompok yang saling berinteraksi secara formal serta melakukan kegiatan secara kolektif yang sifatnya (a) non-komersial; (b) bukan tindak kekerasan; dan (c) bukan merupakan kegiatan yang merepresentasikan pemerintah ataupun negara. Sehingga dalam konteks hubungan internasional NGO mengacu pada organisasi non pemerintah yang beraktivitas melintasi batas negara atau dapat disebut dengan *international non-governmental organization* (Ashari, 2020).

Non-Governmental Organization (NGO) sebagai aktor dalam hubungan internasional yang lahir dari gelombang ketiga transnasionalisme. Kemunculan NGO dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan di antara lapisan masyarakat akibat adanya globalisasi dan pembangunan. Meskipun pada hakikatnya globalisasi dan pembangunan mampu membawa masyarakat pada kecepatan untuk mengakses informasi dan kemudahan dalam melakukan sesuatu. Namun tak dapat dipungkiri globalisasi juga membawa kesengsaraan bagi masyarakat lapisan akar rumput seperti hilangnya kesempatan bekerja (*jobless*), meningkatnya kasus kriminal (*ruthless*), hilangnya jati diri suatu masyarakat karena adat dan budaya telah terasimilasi (*rootless*), hilangnya hak berpendapat (*voiceless*), serta degradasi lingkungan yang berdampak pada ancaman hilangnya masa depan (*futureless*).

NGO memiliki pandangan bahwa masyarakat sipil juga dapat berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini juga didukung oleh pendapat Jan Aart Scholte, yang menyatakan bahwa hadirnya masyarakat sipil dalam tatanan global mampu mendorong proses pengambilan keputusan yang tidak hanya sekadar memberikan pertimbangan kepentingan para pemangku kekuasaan, namun juga dapat mempertimbangkan kepentingan masyarakat sipil (Ginajar, 2020).

Isu pembangunan hadir dengan membawa dampak yang sangat signifikan bagi keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Begitu banyak permasalahan yang dihasilkan oleh proses pembangunan, salah satunya adalah isu lingkungan. Dinamika isu lingkungan selalu berkembang dan sangat luas sekali cakupannya. Hal ini tentu saja membuat Negara bahkan pemerintah kewalahan dalam menangani isu yang sangat beragam serta terdapat keterbatasan di dalamnya. Dengan adanya situasi tersebut maka NGO hadir sebagai rongga pengisi untuk memenuhi kekurangan negara di berbagai

jenis kegiatan di dalam negara. NGO berfungsi sebagai agen pemahaman internasional, pembentuk opini publik, serta berperan sebagai kelompok kepentingan. Semua hal ini tentu sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang semakin kompleks pada tatanan dunia global saat ini yang tidak dimiliki oleh Negara atau pemerintah serta korporasi multinasional.

Munculnya masalah lingkungan hidup dalam studi hubungan internasional juga didorong oleh fenomena globalisasi yang ditopang oleh nilai-nilai kapitalisme dan demokrasi liberal. Hampir seluruh negara di dunia menerima nilai-nilai tersebut sebagai norma utama untuk mengatur aktor-aktor ekonomi dan aktivitas ekonomi antar negara dengan didirikannya *Multinational Corporation* (MNC). Dewasa ini, keberadaan perusahaan-perusahaan multinasional menjadi faktor utama yang menyebabkan degradasi lingkungan dari aktivitas industrialisasi dan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran namun tidak diiringi dengan upaya untuk mencegah dampak yang ditimbulkannya.

Dalam perspektif Philip Eldridge (1996), beliau membagi dua jenis NGO berdasarkan bidang kegiatannya, diantaranya yaitu:

- a. *Development NGO*, kategori ini berkaitan dengan organisasi yang memusatkan perhatiannya pada program pengembangan masyarakat konvensional, yaitu dalam pengembangan irigasi, air minum, pusat kesehatan, pertanian, peternakan, kerajinan dan bentuk pembangunan ekonomi lainnya. *Development NGO* cenderung memberikan dorongan atau menjadi bagian dari pemerintah (*counterpart*) dalam rangka pembangunan baik fisik maupun non fisik pembangunan suatu negara.
- b. *Mobilization NGO*, dalam kategori ini NGO memusatkan perhatiannya pada pendidikan dan mobilisasi rakyat miskin. Isu-isu yang diusung berkaitan dengan ekologi, hak asasi manusia, status perempuan, hak-hak hukum atas kepemilikan tanah, hak-hak pedagang kecil, tunawisma dan penghuni liar dikota-kota besar. Kemudian NGO dalam kategori ini juga bersifat langsung mengkritik terhadap pemerintah.

Dengan adanya paparan terkait tipe NGO tersebut, maka dalam tulisan ini penulis akan menganalisis salah satu NGO yang bergerak dalam isu lingkungan. Salah satu NGO yang aktif memperjuangkan meningkatkan kesadaran dalam mencapai keadilan lingkungan adalah *Green Belt Movement*. Hal ini berdasarkan kondisi kemiskinan serta ketidaksetaraan masal yang terjadi di Kenya diakibatkan oleh deforestasi yang sangat besar. Deforestasi secara tidak proporsional ini berdampak langsung terhadap kualitas

tanah yang kemudian mempengaruhi pada kualitas tanaman bagi kelangsungan hidup masyarakat Kenya. Sehingga GBM hadir untuk membantu mengembalikan kualitas tanah yang memadai bagi pertanian di Kenya, serta mencoba untuk menanam kembali pohon-pohon yang banyak ditebang serta untuk mempertahankan sumber daya alam sebanyak mungkin.

Keberadaan NGO sebagai komunitas masyarakat sipil tidak bisa terlepas dari kondisi masyarakat politik atau institusi politik yang dinilai semakin kurang. NGO berfungsi secara efektif dan karena semakin kuatnya hegemoni negara serta proses marginalisasi sebagai satu dampak pembangunan. Oleh karena itu keberadaan NGO sebagai pengimbang dari hegemoni negara, agar masyarakat memiliki daya tawar menawar terhadap negara. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Dengan kata lain pendekatan *empowerment* merupakan misi utama NGO, sehingga NGO harus sering berhadapan langsung dengan pemerintah. Karena pada dasarnya ketidakberdayaan masyarakat disebabkan oleh lemahnya pendidikan, penduduk yang berlebihan, nilai-nilai tradisional dan korupsi. Dengan demikian NGO seperti yang dinyatakan oleh Mansour Fakih (1996) merupakan salah satu diantara pemain kunci. Terjadinya proses panjang mengenai marginalisasi, subordinasi, dominasi, hegemoni dan dehumanisasi terhadap kaum miskin, oleh karena itu NGO perlu mencari pola hubungan dengan pemerintah yang tetap menjamin otonomi dan efektivitas program kerjanya.

Dalam aksinya *Green Belt Movement* selaku NGO yang memiliki peran pokok sebagaimana yang disebutkan oleh Philip Eldridge di antaranya yaitu: Pertama, memberdayakan masyarakat dan membantu mereka dalam membentuk organisasinya sendiri sesuai kebutuhannya. Kedua, mewujudkan nilai-nilai dan pendekatan partisipatoris dalam pengembangan masyarakat. Ketiga menjadi wakil masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan. Menurut Philip Eldridge, kontribusi NGO dalam proses penguatan demokratisasi negara, maka perluasan basis populernya berkaitan dengan faktor internal dan eksternal. Faktor internal misalnya terletak pada kemampuan NGO untuk memadukan antara pembangunan dan mobilisasi sosial, mengintegrasikan aktivitas makro dengan mikro, melakukan rekonsiliasi antara NGO itu sendiri mengenai tujuan sosial dan politik, melakukan debirokratisasi dalam hubungannya bersama kelompok-kelompok masyarakat yang lebih kecil, mempercepat peranan mediasi terhadap kelompok bawah dalam rangka berhadapan dengan negara sehingga mempercepat terbentuknya *civil society*. Sedangkan faktor eksternal,

efektivitas NGO dalam mendorong demokrasi terutama akan dipengaruhi oleh berfungsi tidaknya lembaga-lembaga politik dan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan NGO sebagai mitra mewujudkan demokratisasi (Eldridge, 1996).

2. Teori *Transnational Advocacy Networks* (TAN)

Menurut Keck dan Sikkink (1999), *Transnational Advocacy Network* merupakan tindakan kolektif yang dilakukan oleh beberapa NGO internasional, koalisi transnasional, jaringan advokasi transnasional serta gerakan sosial transnasional. TAN memiliki karakteristik yang bersifat *voluntary*, *reciprocal* serta *horizontal*. Jaringan advokasi lintas negara termasuk aktor-aktor yang bekerja secara internasional pada masalah, siapa yang terikat bersama-sama oleh nilai-nilai bersama, wacana umum dan pertukaran informasi dan layanan yang padat. Inti dari hubungan tersebut adalah adanya pertukaran informasi. Kemampuan aktor internasional non-tradisional untuk memobilisasi informasi secara strategis untuk membantu menciptakan isu dan kategori baru dan untuk membujuk, menekan dan memperoleh keuntungan memanfaatkan organisasi dan pemerintah jauh lebih kuat. Jaringan advokasi transnasional dapat menjadi bagian dari komunitas kebijakan yang lebih besar yang mengelompokkan aktor dari berbagai institusi dan nilai.

Jaringan advokasi transnasional membingkai isu-isu agar dapat dipahami oleh khalayak sasaran, untuk menarik perhatian dan mendorong tindakan dan untuk menyesuaikan dengan tempat-tempat institusional yang menguntungkan. Dengan membingkai isu tersebut adalah upaya strategis yang disadari oleh kelompok orang untuk membentuk pemahaman bersama tentang dunia dan diri mereka sendiri yang melegitimasi dan memotivasi tindakan kolektif. Aktor jaringan membawa ide, norma, dan wacana baru ke dalam debat kebijakan serta berfungsi sebagai sumber informasi dan kesaksian. Jaringan transnasional mencari pengaruh di banyak lini dengan cara yang sama dengan kelompok politik lain atau gerakan sosial melakukannya, mereka harus menggunakan kekuatan informasi, ide dan strategi mereka untuk mengubah informasi dan konteks nilai dimana negara membuat kebijakan.

TAN memiliki struktur yang bersifat komunikatif bukan birokrasi. Jaringan transnasional bekerja untuk mengatur politik struktur peluang di tingkat internasional dengan menerapkan beberapa taktik dan strategi. Untuk menjalankan strategi ini, maka digunakanlah empat komponen strategi diantaranya yaitu (Keck & Sikkink, 1999):

- a. *Information politics*, merupakan strategi penggunaan data, riset dan menganalisanya untuk kemudian dijadikan bahan advokasi dan kampanye suatu NGO lakukan. *Information politics* juga merupakan suatu kemampuan untuk mentransfer informasi dengan cepat yaitu informasi politik yang memiliki keuntungan dan kredibilitas yang dapat dipercaya dan bersifat faktual. Dengan adanya informasi politik ini diharapkan dapat mengungkap fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan serta sebagai informasi tandingan.
- b. *Symbolic politics*, merupakan kemampuan dalam memberikan suatu kesan yang kuat melalui simbol, aksi, cerita ataupun narasi-narasi yang dramatis dimana nantinya hal ini berguna untuk melukiskan atau menggambarkan situasi serta tuntutan terhadap individu. Intinya melalui simbol-simbol tersebut berguna untuk menunjukkan bahwa kasus yang diangkat tersebut sangat butuh perhatian.
- c. *Leverage politics*, merupakan kemampuan untuk mengajak tokoh-tokoh yang berpengaruh seperti pemerintah, organisasi internasional, artis, tokoh publik maupun perusahaan multinasional guna memberikan pengaruh yang lebih kuat dalam menjalankan kampanyenya.
- d. *Accountability politics*, lebih mengarah pada bagaimana setiap keputusan yang dibuat oleh NGO tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan untuk mengikat komitmen dari aktor yang lebih kuat guna sepenuhnya menjalankan kebijakan atau prinsip-prinsip yang telah mereka nyatakan sebelumnya.

Untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh *Green Belt Movement* maka menggunakan teori *Transnational Advocacy Network* sebagai alat analisisnya. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana suatu NGO melakukan pengorganisasian dengan membuat suatu jaringan yang terstruktur untuk menekan suatu aktor dalam pembuatan kebijakan. Cakupan jaringan yang dibentuk tidak hanya domestik, melainkan juga bersifat transnasional. Dalam melancarkan tujuan untuk mempromosikan isu degradasi hutan dan menampung donor dari berbagai lembaga, institusi maupun individu, *Green Belt Movement* memanfaatkan jejaring transnasional. GBM berhasil dalam setiap pencapaiannya karena memanfaatkan jaringan melalui TAN, sehingga donor dan bantuan dapat memberikan dampak baik untuk pengaplikasian setiap program pembangunan dalam mengatasi isu degradasi hutan Kenya.

D. Argumen Penelitian

Dengan menggunakan pandangan Philip Eldridge penelitian ini berargumen bahwa *Green Belt Movement* dalam mengatasi isu degradasi hutan di Kenya dikategorikan sebagai *development NGO*, hal ini disebabkan karena GBM cenderung memberikan dorongan atau menjadi bagian dari pemerintah (*counterpart*) untuk bersama-sama membangun kebijakan Kenya baik fisik maupun non fisik menjadi lebih hijau.

Kemudian GBM melakukan strategi *Leverage Politics* dalam teori *Transnational Advocacy Network* (TAN), yaitu suatu kemampuan untuk menyerukan kepada aktor yang lebih kuat seperti pemerintah negara lain, organisasi internasional, maupun perusahaan multinasional. Agar permasalahan mengenai isu degradasi hutan Kenya menjadi isu yang lebih besar untuk kemudian dapat diatasi secara nasional dan global.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menulis karya tulis ini adalah metode kualitatif yang bersifat eksplanasi. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang memiliki paradigma fenomenologi, sehingga proses penelitiannya lebih menekankan pada analisa fenomena tertentu, termasuk fenomena hubungan internasional. Metode tersebut didukung dengan data-data yang dikumpulkan menggunakan teknik studi pustaka. Dengan demikian, jenis data yang akan didapatkan dan digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti surat kabar, buku, majalah, laporan, jurnal ilmiah, naskah deklarasi, berita online, situs-situs internet serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk cetak maupun elektronik yang relevan dengan penelitian ini

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ditulis adalah untuk memberikan penjelasan mengenai strategi advokasi yang dilakukan oleh *Green Belt Movement* sebagai NGO lingkungan untuk mengatasi permasalahan degradasi hutan Kenya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini dibagi ke dalam beberapa bab yang dapat menjelaskan dan menguraikan permasalahan guna menjawab rumusan masalah di atas.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan berisi mengenai pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Argumen Penelitian, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: *GREEN BELT MOVEMENT* DAN PROBLEMATIKA DEGRADASI HUTAN KENYA

Pada bab ini akan berisi mengenai sejarah terbentuknya *Green Belt Movement* serta problematika degradasi hutan Kenya. Penjelasan akan diawali dengan sejarah terbentuknya *Green Belt Movement* Kenya dan perjalanan aksinya. Kemudian dilanjutkan mengenai pembahasan deforestasi dan penyebabnya, serta dampak yang ditimbulkan di bidang lingkungan, sosial ekonomi, dan kesehatan.

BAB III: ADVOKASI *GREEN BELT MOVEMENT* DALAM MENGATASI ISU DEGRADASI HUTAN KENYA

Pada bab ini merupakan isi ataupun inti dari pembahasan terkait topik yang diangkat dalam penelitian. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai strategi-strategi advokasi yang dilakukan oleh *Green Belt Movement* dalam level internasional, pemerintah dan *grassroots* untuk menanggapi isu degradasi hutan yang terjadi di Kenya sesuai dengan konsep NGO *Development* Philip Eldridge dan teori *Transnational Advocacy Networks* (TAN).

BAB IV: KESIMPULAN

Pada bab ini akan menjadi bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan.